

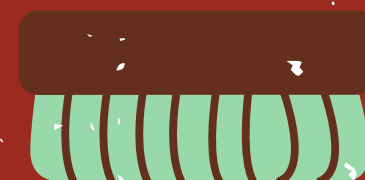


PERMASALAHAN PENDIDIKAN NASIONAL



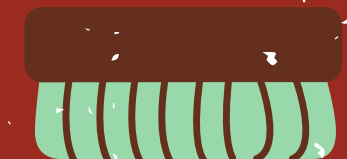
A. PERMASALAHAN POKOK DAN ISU UTAMA DALAM PENDIDIKAN NASIONAL

Pendidikan memiliki peran strategi karena pendidikan merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan juga penting bagi dunia kehidupan yang ideal menumbuhkan kehidupan yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, ketindasan dan lain-lain sebagainya. Dalam perjalanan pembangunan sistem pendidikan nasional tidak pernah lepas dari warna sosial, politik ekonomi dan budaya yang lingkungannya. Sejak Indonesia merdeka 1945 hingga saat ini Indonesia terus membenahi sistem pendidikan nasional yang namun dampaknya belum signifikan dalam pembangunan Indonesia atau bisa disebut belum optimal secara sistem pendidikannya karena adanya permasalahan-permasalahan yang ada seperti pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, efisiensi dan efektivitas pendidikan.



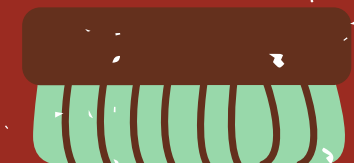
1. Masalah Pemerataan Pendidikan

Permasalahan pemerataan diantaranya terjadi karena kurangnya terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.



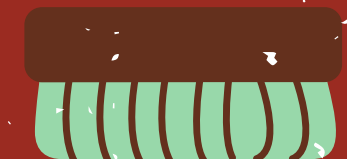
2. Mutu dan Relevansi Pendidikan

Mutu sama halnya dengan kualitas dan bobot. Jadi pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara pada saat ini, sedangkan relevan berarti bersangkutan paut, kait mengait, dan berguna secara langsung. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Selain itu kurikulum sekolah yang terstruktur dan syarat dengan beban menjadikan proses pembelajaran menjadi kaku dan tidak menarik. Pendidikan seperti ini tidak memupuk kreativitas siswa untuk belajar secara efektif sistem yang berlaku pada sekarang tidak mampu membawa guru dan dosen untuk melakukan pembelajaran serta pengelolaan pembelajar menjadi lebih inovatif. Akibat dari pelaksanaan pendidikan tersebut sekolah menjadi cenderung kurang fleksibel dan tidak mudah berubah seiring dengan perubahan waktu dan masyarakat.



3. Efisiensi dan Efektifitas Pendidikan

- Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga dan biaya tepat sasaran, dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, di mana pemanfaatan skala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani.
- Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan adalah untuk mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin.



ISU-ISU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



1) Dampak Globalisasi

Globalisasi merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Globalisasi juga membawa dampak bagi dunia pendidikan, terutama sebagai suatu wadah untuk mempersiapkan SDM yang mampu mengendalikan dan memanfaatkan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh proses globalisasi itu. Dalam dunia pendidikan pendidik juga harus menyiapkan secara peserta didik dengan kompetensi kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan seperti kompetensi keagamaan, akademi, sosial dan ekonomi.

2) Pelaksanaan Wajib Belajar

Undang Undang No 20 Tahun 2003 merupakan amandemen dari UU No 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pendidikan yang wajib diikuti oleh setiap warga negara adalah pendidikan dasar selama sembilan tahun. Dalam menjalankan ketentuan undang-undang ini pemerintah melaksanakan suatu program yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang pertama kali diluncurkan oleh pada tahun 1994.

Dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini dikandung maksud upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.



3) Standar Nasional Pendidikan

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan merupakan salah satu penjabaran yang diamanatkan oleh UU nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas terkait dengan standar nasional pendidikan. Dalam PP itu dijelaskan tentang lingkup SNP yang meliputi

1. standar isi

2. standar proses

3. standar kompetensi kelulusan 4. standar pendidikan dan kependidikan

5. standar sarana dan prasarana

6. standar pengelolaan

7. standar pembiayaan

8. standar penilaian pendidikan

Diantara tugas utama band adalah melakukan akreditasi atau penilaian dan sertifikasi terhadap kelayakan lembaga-lembaga penyelenggaraan pendidikan baik sekolah atau madrasah perguruan tinggi maupun penyelenggara pendidikan non formal ditinjau dari SNP



4) Desentralisasi Pendidikan

Pada sektor pendidikan merupakan konsekuensi pemberlakuan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Struktur pemerintahan menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pasal 1 dan 2 pemerintah pusat dan daerah otonomi. Daerah otonomi terdiri atas daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Masing-masing daerah otonomi berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan hierarkis satu sama lain tetapi memiliki hubungan koordinatif dan kerjasama kemitraan. Penetapan standar pelayanan minimal harus diberikan dalam setiap jenjang jenis dan jalur pendidikan yang disertai dengan indikator. Meskipun secara normatif peningkatan pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan harus dilaksanakan namun karena perbedaan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi maka pemerataan kesempatan ini masih belum sepenuhnya dapat terwujud.

5) Kurikulum Sekolah

Pengembangan kurikulum bisa menggunakan pendekatan sentralistik atau desentralistik. masing-masing pendekatan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dengan adanya standar nasional pendidikan, khususnya standar isi dan standar kompetensi lulusan, kurikulum dikembangkan pada tingkat satuan pendidikan sebagaimana dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagai standar kompetensi lulusan dikaitkan dengan kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik yang diperoleh dari sekolah. Dalam rangka dijadikan acuan, secara elaboratif dikembangkan standar isi dan kompetensi lulusan oleh BSNP untuk dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum.





B. BEBERAPA PERMASALAHAN PENDIDIKAN SAAT INI

1. Kurikulum 2013

UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3 memerintahkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, dan otonomi pendidikan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Kurikulum pertama Indonesia adalah Rencana Pembelajaran, sampai dirubah ke KBK, KTSP, Kurikulum 13, sampai Kurikulum Merdeka.

Kurikulum 2013 dianggap terlalu tergesa-gesa dalam pelaksanaannya sehingga menuai banyak kritikan karena dianggap memiliki segudang masalah. yaitu a) Masalah Isi dan Kemasan
b) Masalah Guru



2. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

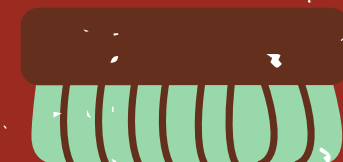
Rintisan sekolah bertaraf internasional bisa disingkat dengan (RSBI) adalah sekolah standar internasional (SSN) yang menyiapkan peserta didik berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP) Indonesia dan bertaraf internasional sehingga diharap lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional. Program ini mencetak sekolah berstandar internasional bisa disingkat dengan (SBI) melalui pembentukan rintisan sekolah berstandar internasional bisa disingkat dengan RSBI yang dimulai sejak 2005 lalu jalan di tempat. Sebagian besar sekolah terkesan mengakhiri perjuangan mereka ketika sudah mendapatkan label (RSBI). Evaluasi 2011 kementerian pendidikan dan kebudayaan bisa disingkat Kemendikbud menyebutkan, seluruh RSBI yang ada di negeri ini belum layak menjadi SBI.



3. Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

MBS, (Manajemen Berbasis Sekolah) merupakan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah secara mandiri. Indikasi MBS tampak pada wawasan segenap personal sekolah yang berorientasi pada mutu, dan peran aktif semua pihak terkait dalam pelaksanaan.

MBS merupakan kebijakan yang bersemangatkan desentralisasi. Melalui program ini, diharapkan sekolah bisa menjadi institusi yang mandiri dengan memanfaatkan semua sumber daya yang mereka miliki. Oleh karena itu, partisipasi semua pihak sangatlah dibutuhkan dalam mensukseskan program ini, termasuk orang tua murid. Penerapan MBS juga memberikan dampak dalam peningkatan mutu pendidikan. Diantara dampak seperti terciptanya lingkungan belajar yang efektif bagi siswa dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Namun, juga banyak terdapat hambatan dalam menjalankannya seperti pihak sekolah yang tidak ingin mendapat tambahan pekerjaan dan ketidakpahaman terhadap aplikasi MBS itu sendiri.



C. UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI INDONESIA



Muhammad Ali (2009: 273-274) mengemukakan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan nasional perlu dilakukan melalui strategi, sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan Penerapan Standar Nasional

Yang telah dikembangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar-standar ini digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan akreditasi lembaga-lembaga pendidikan dan berbagai program keahlian serta program studi yang dilakukan oleh BAN S/M dan BAN PT.

2. Melakukan Penilaian Melalui Ujian Sekolah dan Ujian Nasional

Ujian tersebut dilakukan oleh sebuah badan mandiri yang ditugasi untuk melaksanakannya. Ujian Nasional mengukur ketercapaian kompetensi PD berdasarkan standar nasional untuk melakukan pemetaan dan analisis kualitas pendidikan yang dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi sampai nasional.



3. Menganalisis dan Mengevaluasi Yang Sistematis Terhadap Hasil Ujian

Dimaksudkan untuk menentukan faktor penguangkit dalam upaya peningkatan kualitas, baik antara satuan pendidikan, antar kabupaten/kota, provinsi, atau melalui pengelompokan lainnya. Analisis dilakukan oleh Pemerintah bersama pemerintah provinsi yang dibantu oleh Lembaga Penjaminan Kualitas Pendidikan (LPMP) pada masing-masing wilayah.



4. Melakukan Tindakan Afirmatif Pada Satuan Pendidikan

Melakukan tindakan afirmatif dengan memberikan perhatian lebih besar pada satuan pendidikan yang kualitasnya masih rendah, baik dilihat dari input, proses, maupun output.



5. Melaksanakan Akreditasi Satuan atau Program Pendidikan

Untuk menentukan tingkat kelayakan masing-masing. Penilaian dilakukan paling lama setiap 4 tahun dengan mengacu pada SNP. Hasil akreditasi dijadikan sebagai landasan untuk melakukan program pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas setiap satuan/program pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh badan independen yang khusus ditugasi, seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN S/M).



6. Mengembangkan dan Meningkatkan Profesionalisme Guru

Pengembangan dan peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Sebagai tenaga profesional, guru dan tenaga kependidikan harus memiliki sertifikat profesi setelah menempuh pendidikan profesi dan berdasarkan hasil uji kompetensi.



7. Mengembangkan Kurikulum Yang Relevan

Meningkatkan relevansi pendidikan diperlukan pengembangan kurikulum yang relevan dengan pangsa pasar/dunia kerja. Investasi juga dilakukan untuk pengembangan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan nonformal, dan pendidikan tinggi. Pendidikan kejuruan, vokasi, dan profesi membutuhkan profesional lebih tinggi, dan perlu ada penguatan agar lulusannya dapat memenuhi tuntutan lapangan kerja, standar kualifikasi kerja, profesionalisme, dan produktivitas kerja yang terus berkembang.

8. Mengembangkan Sekolah/Perguruan Tinggi Bertaraf Internasional

Mengejar keunggulan dan daya saing perlu dikembangkan sejumlah sekolah/madrasah dan perguruan tinggi yang bertaraf internasional menggunakan hasil pengukuran yang berstandar internasional dan menggunakan benemark institusi pendidikan unggul di dunia.

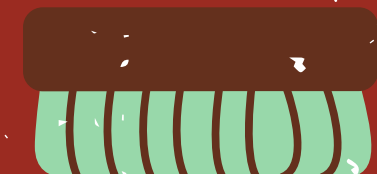


Kesimpulan :

Banyak faktor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, diantaranya adalah rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Maka disinilah dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia untuk membangun generasi yang tangguh.



Video
Implementasi





TERIMA KASIH

